

# Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Mamuju

Regina<sup>1\*</sup>, Irwandi<sup>2</sup>, Ilma Wulansari Hasdiansa<sup>3</sup>  
[regina@unm.ac.id](mailto:regina@unm.ac.id)<sup>1\*</sup>, [irwandi@unm.ac.id](mailto:irwandi@unm.ac.id)<sup>2</sup>, [ilma.wulansari@unm.ac.id](mailto:ilma.wulansari@unm.ac.id)<sup>3</sup>

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Makassar<sup>1,2</sup>  
Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Makassar<sup>3</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif, digunakan untuk menjelaskan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju dan metode analisis efektivitas, digunakan untuk mengetahui efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju, yaitu dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pengawasan dengan rencana pengawasan yang ditetapkan dengan dikali 100%, guna mengetahui tingkat efektivitas (hasil) yang dicapai untuk mencapai tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau sudah efektif.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pengawasan, Keuangan Daerah

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## Pendahuluan

Di dalam suatu Negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu system pemerintahan (*governance*) yang baik. Sistem ini di perlukan sebagai alat (*instrument*) untuk melaksanakan berbagai pelayanan public di berbagai daerah dan juga sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang di hadapi dengan koridor-koridor kehidupan nasional. Pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ekonomi nasional dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Salah satu ciri demokrasi ekonomi adalah perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi yang ada pada daerah secara optimal.

Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan pengawasan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan meningkatkan kemakmuran rakyat yang merata, namun dalam proses pelaksanaan otonomi daerah, baik aturan, kewenangan, serta mekanisme kerja yang telah ditetapkan tidaklah menjamin untuk dijalankan dengan baik, lagi-lagi realitas pembangunan menyatakan kita akan krisis moral oleh pelaksana pembangunan yang berujung pada kecenderungan adanya penyimpangan seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Penyimpangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi penyakit dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kasus yang menunjukkan krisis moralitas para pelakunya. Maka, disinilah pentingnya peran inspektorat dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah, khususnya di

kabupaten Mamuju agar efektif dalam pelaksanaannya. Artinya bahwa secara kelembagaan, Inspektorat kurang memiliki kemandirian untuk menyampaikan laporan secara wajar dan objektif. Hal ini disebabkan karena pemda belum menetapkan Perda yang secara tegas. Diharapkan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat tidak hanya dalam akhir proses manajemen, akan tetapi berada dalam setiap tingkatan proses manajemen. Proses paradigma pengawasan internal yang telah meluas dari sekedar *watchdog* (menemukan penyimpangan) ke posisi yang lebih luas yaitu pada misi dan tujuan organisasi.

Dengan dikeluarkannya peraturan bupati (PERBUP) kota Mamuju No. 21 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah inspektorat daerah kabupaten Mamuju, maka Inspektorat melakukan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang melakukan pengawasan keuangan pada instansi / kantor (BUMD) milik pemerintah. Pengawasan keuangan daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini difokuskan pada pengawasan keuangan daerah untuk sektor belanja kabupaten Mamuju.

## Metode Analisis

Penelitian ini akan dilaksanakan pada instansi pemerintahan, dalam hal ini yaitu lembaga inspektorat kabupaten Mamuju. Jl. Ahmad Kirang No 39, Binanga, Mamuju. Sedangkan, waktu pelaksanaan dalam penelitian ini yaitu di mulai bulan Agustus 2022. Populasi pada penelitian ini adalah auditor internal yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah pada Inspektorat kabupaten Mamuju. Adapun Adapun sampel dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan pada lembaga inspektorat Kabupaten Mamuju tahun 2018, 2019 dan 2020.

Penelitian dengan cara dokumentasi adalah pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, agenda, atau hukum-hukum dan lain sebagainya. Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini adalah dengan cara bagaimana melakukan studi komparatif atau melakukan pendekatan-pendekatan pada objek penelitian, diantaranya, metode observasi, suatu penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada badan (lembaga) tersebut. Dokumen perusahaan. Data ini adalah data anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif, digunakan untuk menjelaskan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Makassar. Analisis Efektivitas, digunakan untuk mengetahui efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Makassar, yaitu dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pengawasan dengan rencana pengawasan yang ditetapkan dengan dikali 100%, guna mengetahui tingkat efektivitas (hasil) yang dicapai untuk mencapai tujuan. Berikut rumusan rasio efektivitas pengawasan keuangan daerah yang digunakan.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pengawasan}{Rencana\ Pengawasan} \times 100\%$$

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

Adapun untuk melengkapi data analisis pengawasan di Inspektorat Kabupaten Mamuju, maka data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah data untuk tiga tahun Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 1 Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (Tidak Langsung)**

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2018	1.026.316.500	1.026.316.500	1.026.316.500	1.026.316.500	4.105.266.000	0%
2019	671.268.000	671.268.000	700.668.000	641.847.474	2.685.051.474	0,6%
2020	849.387.295	1.132.516.394	1.125.302.297	1.096.005.686	4.203.211.672	1,5%
<b>Total</b>	<b>2.546.971.795</b>	<b>2.830.100.894</b>	<b>2.852.286.797</b>	<b>2.764.169.660</b>	<b>10.993529.146</b>	<b>X= 1,35%</b>

Sumber Tabel 1 Inspektorat Kabupaten Mamuju

Berdasarkan tabel Maka dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program kerja belanja pegawai (tidak langsung). Antara lain pada tahun 2018 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 4.105.266.000, sedangkan untuk tahun 2019 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 2.685.051.474, dan pada tahun 2020 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 4.203.211.672, dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun tersebut sebesar 1,35 % pertahunnya.

**Tabel 2 Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (Langsung)**

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2018	1.062.160.000	1.062.160.000	1.062.160.000	1.062.160.000	4.248.640.000	0 %
2019	1.164.687.850	2.308.164.250	1.476.694.400	641.847.474	5.591.393.974	1.31%
2020	726.869.200	1.125.302.297	1.096.005.686	748.080.750	3.696.257.933	6,10%
<b>Total</b>	<b>2.953.717.050</b>	<b>4.495.626.547</b>	<b>3.634.860.086</b>	<b>2.452.088.224</b>	<b>13.536.291.907</b>	<b>X=4,32%</b>

Sumber Tabel 2 Inspektorat Kabupaten Mamuju

Berdasarkan tabel Maka dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program kerja belanja pegawai (langsung). Antara lain pada tahun 2018 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 4.248.640.000 sedangkan untuk tahun 2019 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 5.591.393.974 dan pada tahun 2020 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp3.696.257.933, dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun tersebut sebesar 4,32% pertahunnya.

**Tabel 3 Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Program Kerja Belanja Barang dan Jasa**

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2018	2.020.548.500	2.020.548.500	2.020.548.500	2.020.548.500	8.082.194.000	0 %
2019	366.257.850	3.872.882.450	644.640.350	563.806.250	5.447.586.900	4,4%
2020	1.739.249.750	1.376.476.753	1.019.675.650	715.750.250	4.851.152.403	0,89%
<b>Total</b>	<b>4.126.056.100</b>	<b>7.269.907.703</b>	<b>3.684.864.500</b>	<b>3.300.105.000</b>	<b>18.380.933.303</b>	<b>X= 4,8%</b>

Sumber Tabel 3 Inspektorat Kabupaten Mamuju

Berdasarkan tabel, dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program kerja belanja barang dan jasa. Antara lain pada tahun 2018 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 8.082.194.000 sedangkan untuk tahun 2019 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 5.447.586.900 dan pada tahun 2020 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 4.851.152.403, dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun tersebut sebesar 4,8% pertahunnya.

**Tabel 4 Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Program Kerja Belanja Modal**

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2018	1.576.170.000	176.524.500	1.825.344.000	1.823.445.000	5.401.483.500	0 %
2019	2.786.500.000	2.564.750.000	2.656.325.000	2.765.455.320	10.773.030.320	1,9%
2020	1.985.565.230	1.876.500.350	1.756.520.000	1.925.650.540	7.544.236.120	0,7%
<b>Total</b>	<b>6.348.235.230</b>	<b>4.617.774.850</b>	<b>6.238.189.000</b>	<b>6.514.550.860</b>	<b>23.718.749.940</b>	<b>X= 2,6%</b>

Sumber Tabel 4 Inspektorat Kabupaten Mamuju

Berdasarkan tabel 4, Maka dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program kerja belanja modal. Antara lain pada tahun 2018 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 5.401.483.500 sedangkan untuk tahun 2019 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 10.773.030.320 dan pada tahun 2020 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 7.544.236.120, dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun tersebut sebesar 2,6% pertahunnya.

**Tabel 5 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (Tidak Langsung)**

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2018	926.776.850	988.750.800	985.955.730	997.856.780	3.889.340.160	0%
2019	491.285.550	561.558.435	655.958.300	571.957.485	2.280.759.770	0,5%
2020	665.987.775	995.782.890	988.875.560	996.885.870	3.647.532.095	1,5%
<b>Total</b>	<b>2.084.050.175</b>	<b>2.546.092.125</b>	<b>2.630.789.590</b>	<b>2.566.700.135</b>	<b>6.534.632.025</b>	<b>X= 1,25%</b>

Sumber Tabel 5 Inspektorat Kabupaten Mamuju

Berdasarkan tabel 5 Maka dapat dijelaskan bahwa realisasi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program kerja belanja pegawai (tidak langsung). Antara lain pada tahun 2018 jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp 3.889.340.160 sedangkan untuk tahun 2019 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 2.280.759.770 dan pada tahun 2020 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 3.647.532.095, dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun tersebut sebesar 1,25% pertahunnya.

**Tabel 6 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (Langsung)**

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2018	982.755.800	995.870.675	998.860.782	988.894.855	3.966.382.112	0 %
2019	985.875.850	1.978.870.250	1.210.994.756	581.947.884	4.757.688.740	1,9%
2020	626.769.820	995.882.897	996.875.889	648.780.755	3.268.309.361	0,6%
<b>Total</b>	2.595.401.470	3.970.623.822	3.206.731.427	2.219.623.494	11.992.380.213	X= 2,5%

Sumber Tabel 6 Inspektorat Kabupaten Mamuju

Berdasarkan tabel 6 Maka dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program kerja belanja pegawai (langsung). Antara lain pada tahun 2018 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 3.966.382.112 sedangkan untuk tahun 2019 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 4.757.688.740 dan pada tahun 2020 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp3.268.309.361, dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun tersebut sebesar 2,5% pertahunnya.

**Tabel 7 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Program Kerja Belanja Barang dan Jasa**

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2018	2.020.548.500	2.020.548.500	2.020.548.500	2.020.548.500	8.082.194.000	0 %
2019	366.257.850	3.872.882.450	644.640.350	563.806.250	5.447.586.900	4,4%
2020	1.739.249.750	1.376.476.753	1.019.675.650	715.750.250	4.851.152.403	0,89%
<b>Total</b>	4.126.056.100	7.269.907.703	3.684.864.500	3.300.105.000	18.380.933.303	X= 4,8%

Sumber Tabel 7 Inspektorat Kabupaten Mamuju

Berdasarkan tabel, dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program kerja belanja barang dan jasa. Antara lain pada tahun 2018 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 8.082.194.000 sedangkan untuk tahun 2019 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 5.447.586.900 dan pada tahun 2020 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp4.851.152.403, dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun tersebut sebesar 4,8% pertahunnya.

**Tabel 8 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Program Kerja Belanja Modal**

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2018	1.276.190.000	156.924.900	1.525.944.980	1.789.885.950	4.748.945.830	0%
2019	2.686.980.000	2.484.950.000	2.456.925.000	2.665.955.720	8.447.578.220	1,7%
2020	1.785.965.830	1.775.800.950	1.696.920.500	1.875.690.940	7.134.378.220	0,84%
<b>Total</b>	5.749.135.830	4.417.675.850	5.679.790.480	6.331.532.610	20.330.902.270	X= 2,54%

Sumber Tabel 8 Inspektorat Kabupaten Mamuju

Berdasarkan tabel 8, dapat dijelaskan bahwa realisasi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program kerja belanja modal. Antara lain pada tahun 2018 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 4.748.945.830 sedangkan untuk tahun 2019 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 8.447.578.220 dan pada tahun 2020 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 7.134.378.220, dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun tersebut sebesar 2,54% pertahunnya.

**Tabel 9 Gabungan Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Uraian	Tahun			Perkembangan (%)
	2018	2019	2020	
Belanja pegawai (tidak langsung)	4.105.266.000	2.685.051.474	4.203.211.672	X= 1,35%
Belanja pegawai (langsung)	4.248.640.000	5.591.393.974	3.696.257.933	X= 4,32%
Belanja barang dan jasa	8.082.194.000	5.447.586.900	4.851.152.403	X= 4,8%
Belanja modal	5.401.483.500	10.773.030.320	7.544.236.120	X= 2,6%
Total	21.837.583.500	24.497.062.668	20.294.858.128	X= 11,7%

Sumber Tabel 9 Inspektorat Kabupaten Mamuju

Berdasarkan tabel 9, dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap rencana belanja dalam setiap tahunnya. Antara lain untuk belanja pegawai (tidak langsung) pada tahun 2018 sebesar Rp 4.105.266.000, pada tahun 2019 sebesar Rp 2.685.051.474 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 4.203.211.672, dengan perkembangan rata-rata sebesar (X)= 1,35%. Untuk belanja pegawai (langsung) tahun 2018 sebesar Rp. 4.248.640.000, pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.591.393.974 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.696.257.933 dengan perkembangan rata-rata sebesar (X) = 4,32%. Kemudian untuk belanja barang dan jasa pada tahun 2018 sebesar Rp. 8.082.194.000, pada tahun 2019 sebesar, Rp. 5.447.586.900 dan tahun 2020 sebesar Rp. 4.851.152.403, dengan perkembangan rata-rata (X)= 4,8%. Sedangkan untuk belanja modal pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.401.483.500, pada tahun 2019 sebesar, Rp. 10.773.030.320 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 7.544.236.120, dengan rata-rata perkembangan (X)= 2,6%.

**Tabel 10 Gabungan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Uraian	Tahun			Perkembangan (%)
	2018	2019	2020	
Belanja pegawai (tidak langsung)	3.889.340.160	3.889.340.160	3.647.532.095	X= 1,25%
Belanja pegawai (langsung)	3.966.382.112	4.757.688.740	3.268.309.361	X= 2,5%
Belanja barang dan jasa	8.082.194.000	5.447.586.900	4.851.152.403	X= 4,8%
Belanja modal	4.748.945.830	8.447.578.220	7.134.378.220	X= 2,54%
Total	20.686.862.102	22.542.194.020	18.901.372.079	(X) = 9,82%

Sumber Tabel 10 Inspektorat Kabupaten Mamuju

Berdasarkan tabel 10, dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap realisasi belanja dalam setiap tahunnya. Antara lain untuk belanja pegawai (tidak langsung) pada tahun 2018 sebesar Rp 3.889.340.160, pada tahun 2019 sebesar Rp 3.889.340.160 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 3.647.532.095, dengan perkembangan rata-rata sebesar (X)=1,25%. Untuk belanja pegawai (langsung) tahun 2018 sebesar Rp. 3.966.382.112, pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.757.688.740 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.268.309.361 dengan perkembangan rata-rata sebesar (X) = 2,5%. Kemudian untuk belanja barang dan jasa pada tahun 2018 sebesar Rp. 8.082.194.000, pada tahun 2019 sebesar, Rp. 5.447.586.900 dan tahun 2020 sebesar Rp. 4.851.152.403, dengan perkembangan rata-rata (X)= 4,8%. Sedangkan untuk belanja modal pada tahun 2018 sebesar Rp. 4.748.945.830, pada tahun 2019 sebesar, Rp. 8.447.578.220 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 7.134.378.220, dengan rata-rata perkembangan (X)= 9,82%.

**Tabel 11 Gabungan Rencana dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Tahun	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih Anggaran	
			(Rp)	(%)
2018	21.837.583.500	20.686.862.102	1.150.721.398	5,2%
2019	24.497.062.668	22.542.194.020	1.954.868.648	7,9%
2020	20.294.858.128	18.901.372.079	1.393.486.049	6,8%
<b>Total</b>	<b>66.629.504.296</b>	<b>62.130.428.201</b>	<b>4.499.076.095</b>	<b>6,7%</b>

Sumber Tabel 11 Inspektorat Kabupaten Mamuju

Berdasarkan tabel 11, Dapat dijelaskan bahwa Rencana dan Realisasi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten mamuju. Untuk tahun 2018 total rencana anggaran sebesar Rp 21.837.583.500 total realisasi anggaran sebesar Rp 20.686.862.102, dengan selisih anggaran sebesar Rp 1.150.721.398, atau sebesar 5,2 %. Kemudian untuk tahun 2019 total rencana anggaran sebesar Rp 24.497.062.668, total realisasi anggaran sebesar Rp 22.542.194.020, dengan selisih anggaran sebesar Rp 1.954.868.648, atau sebesar 7,9 %. Sedangkan untuk tahun 2020 total rencana anggaran sebesar Rp 20.294.858.128, total realisasi anggaran sebesar Rp 18.901.372.079, dengan selisih anggaran sebesar Rp 1.393.486.049, atau sebesar 6,8 %. Berdasarkan besaran nilai anggaran pertahun tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa total rencana anggaran untuk tiga tahun anggaran tersebut sebesar Rp.66.629.504.296, dan total realisasi anggarannya sebesar Rp. 62.130.428.201 dengan selisih anggaran sebesar Rp 4.499.076.095, atau sebesar 6,7 %.

## Pembahasan

Untuk menguji hipotesis penelitian ini, maka analisis dan penilaian efektivitas ini dapat dilakukan untuk menentukan efektivitas pengawasan anggaran dari setiap tahun anggaran (2018,2019 dan 2020) dengan berpatokan pada tabel-tabel yang ada. Dalam menganalisis efektivitas pengawasan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten mamuju, maka analisis efektivitas yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran kemudian dikali seratus persen, atau :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pengawasan}}{\text{Rencana Pengawasan}} \times 100\%$$

Berikut analisis efektivitas pengawasan anggaran belanja SKPD kota makassar :

1. Analisis efektivitas pengawasan anggaran SKPD Kabupaten Mamuju pada tahun 2018 yaitu Analisis Eektivitas pengawasan anggaran SKPD Kabupaten Mamuju tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara total realisasi anggaran dengan total rencana anggaran dikali seratus persen, atau :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{20.686.862.102}{21.837.583.500} \times 100 \\ &= 94\% \end{aligned}$$

2. Analisis efektivitas pengawasan anggaran SKPD Kabupaten Mamuju 2019 yaitu: Analisis Eektivitas pengawasan anggaran SKPD Kabupaten Mamuju 2019 dilakukan dengan membandingkan antara total realisasi anggaran dengan total rencana anggaran dikali seratus persen, atau:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{22.542.194.020}{24.497.062.668} \times 100 \\ &= 92\% \end{aligned}$$

3. Analisis efektivitas pengawasan anggaran SKPD Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 yaitu: Analisis Eektivitas pengawasan anggaran SKPD Kabupaten Mamuju 2020 dilakukan dengan membandingkan antara total realisasi anggaran dengan total rencana anggaran dikali seratus persen, atau :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{18.901.372.079}{20.294.858.128} \times 100 \\ &= 93\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pengawasan anggaran belanja (SKPD) Kabupaten Mamuju, maka dapat dilakukan penilaian efektivitas untuk menentukan tingkat efektivitas yang pengawasan yang dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju. Penilaian



efektivitas pengawasan dilakukan berdasarkan kriteria efektivitas pengawasan keuangan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 12 Kriteria Kinerja Keuangan**

Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100 %	Sangat Efektif
80-90 %	Efektif
60-80%	Cukup Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber Tabel 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

**Keterangan:**

- 1 Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- 2 Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 90% sampai 100%berarti efektif.
- 3 Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 80% sampai 90% berarti cukup efektif.
- 4 Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 60% sampai 80% berarti kurang efektif.
- 5 Hasil perbandingan atau persentase pencapaian kurang dari 60% berarti tidak efektif.

Berdasarkan hasil analisis dan kriteria penilaian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa efektivitas pengawasan anggaran belanja (SKPD Kabupaten Mamuju untuk masing-masing tahun anggaran, antara lain: Untuk tahun 2018 hasil analisis pengawasan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju dengan angka persentase mencapai 94%, maka angka persentase pengawasan tersebut telah mencapai angka persentase kriteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif. Kemudian untuk tahun 2019 hasil analisis pengawasan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Kabupaten Mamuju dengan angka persentase mencapai 92%, maka angka persentase pengawasan tersebut telah mencapai angka persentase kriteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif. Sedangkan, untuk tahun 2020 hasil analisis pengawasan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju dengan angka persentase mencapai 93%, maka angka persentase pengawasan tersebut telah mencapai angka persentase kriteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif. Sedangkan Untuk tahun 2020 hasil analisis pengawasan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju dengan angka persentase mencapai 93%, maka angka persentase pengawasan tersebut telah mencapai angka persentase kriteria antara 90% s/d 100% tergolong efektif.

**Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka simpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor yang mendukung pengawasan pelaksanaan SKPD di Kabupaten Mamuju adalah meliputi fasilitas yaitu sudah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sehingga mendukung pelaksanaan pengawasan, dan komitmen pimpinan serta pegawai Inspektorat Kabupaten Mamuju yang bersikap profesional dalam melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangannya sudah menunjang fungsi pengawasan yang dilakukan; (2) Bahwa pengawasan keuangan daerah yang

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju terhadap anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tahun anggaran masing-masing 2018 sebesar 94%, kemudian ditahun 2019 sebesar 92%, dan ditahun 2020 sebesar 93% sehingga dapat dikatakan telah mencapai kriteria Efektif.

Berdasarkan simpulan diatas, saran-saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya yaitu: (1) Untuk Pimpinan Inpektorat Kabupaten Mamuju selaku top leader agar lebih meningkatkan efektivitas pengawasan khususnya pengawasan keuangan daerah, dengan meningkatkan mutu kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Mamuju, (2) Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat memperoleh informasi yang lebih efektif lagi. Jadi, penulis berharap agar peneliti selanjutnya dapat menambah responden atau informan untuk menggali banyak informasi mengenai efektivitas pengawasan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Mamuju

## Referensi

- Andri eko putra (2015) Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api (Persero) Devisi Regional III Sumatera Selatan, Penerbit: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id>
- Annisa Islamiyah Nur (2017) Analisis Efektivitas Badan Pengawasan Keuangan Daerah Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng, Penerbit: <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>
- Ahmad surkati (2017), Otonomi Daerah Sebagai Instrumnt Pertumbuhan Kesejahteraan Dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, Penerbit: <http://media.neliti.com>
- Anjar nora vurry, wayan suwendra, fridayana yudiatmaja (2018), Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, Penerbit: [ejournal.undiksha.ac.ad](http://ejournal.undiksha.ac.ad)
- Gary Jonathan Mingkid, Daud Liandi Dan Johny Lengkong (2017) Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan, Penerbit: [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)
- Halim A (2004), Manajemen Keuangan Daerah, edisi revisi, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Hasni ahmad (2017), Analisis Efektivitas Badan Pengawasan Keuangan Daerah Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng Hasni Ahmad, penerbit: <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/17>
- Luchman sanjaya (2015) *optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kabupaten sidoarjo*, Penerbit: <https://jkmp.umsida.ac.id>
- Nuralam T (2018) dalam (Analisis Pengawasan Keuangan Terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran Pada Kantor Bupati Enrekang, penerbit: <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kota Mamuju No. 21 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah inspektorat daerah kabupaten mamuju.
- Rizka Sari Nanda (2018), Peran Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi islam. Penerbit: <http://repository.radenintan.ac.id>
- Samrah (2018) Analisis Anggaran Dan Realisasi Sebagai Alat Bantu Untuk Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Pada Pt Pln (Persero) Wilayah Sulselrabar, Penerbit: <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>
- Samsidar (2017) Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar, Penerbit: <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Luchman sanjaya (2015) *optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kabupaten sidoarjo*, Penerbit: <https://jkmp.umsida.ac.id>

- Nuralam T (2018) dalam (Analisis Pengawasan Keuangan Terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran Pada Kantor Bupati Enrekang, penerbit: <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kota Mamuju No. 21 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah inspektorat daerah kabupaten mamuju.
- Rizka Sari Nanda (2018), Peran Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penerbit: <http://repository.radenintan.ac.id>
- Samrah (2018) Analisis Anggaran Dan Realisasi Sebagai Alat Bantu Untuk Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Pada Pt Pln (Persero) Wilayah Sulselrabar, Penerbit: <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>
- Samsidar (2017) Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar, Penerbit: <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>
- UUD nomor 79 tahun 2005 pasal 24 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.